

JOURNALISTIC ETHICS MANAGEMENT
(Case Study Of Aji Kupang Election Reporting)

MANAJEMEN ETIK JURNALISTIK
(Studi Kasus Pemberitaan Pemilu AJI Kota Kupang)

¹Yohanes Letu Hayon
yohanesletu70@gmail.com
²Yohanes Adrianus RH
¹STIE Putera Timor Kupang
²Jurnalis Media Online Okezone

ABSTRACT

Choosing a quality leader, especially a political leader, depends on the information that voters receive in the election process. Two important components that play a role in providing information are political parties and the mass media. Between these two components, the mass media holds an important key. Therefore this study aims to determine the management of news coverage in the mass media; how about the news, especially published political news, is processed ethically within the framework of management functions in general. This research was conducted at Aji Kupang City using a qualitative approach. Observations and interviews, supported by scientific references, are techniques for obtaining and analyzing data. The results of the study show that news management in the mass media is generally in line with management functions. The problem is in the online media. In online media, news management does not function properly due to limited human resources. Field studies show that the media and journalists are caught up in ethical issues when reporting on political events; especially news about prospective political leaders. The mass media and journalists are trapped in a decision that violates the journalistic code of ethics by siding with a particular candidate. This partiality can be seen in every report regarding a candidate who is supported by other candidates. Self-integrity is the reason journalists are trapped in this problem. As a solution, researchers offer a management model that is expected to minimize violations of journalistic ethics. The news management model in applying management functions, pays attention to the following elements: 1) Issue exploration team, 2) Supervisory Board, 3) Complaint Center, 4) Education and Training implementing agency, 5) Technical Rules

Keywords: *journalists, journalistic ethics, ethics management model*

ABSTRAK

Memilih pemimpin yang berkualitas, terlebih pemimpin politis, tergantung pada informasi yang diterima pemilih dalam proses pemilihan. Dua komponen penting yang berperan dalam memberikan informasi adalah partai politik dan media massa. Di antara dua komponen ini, media massa pemegang kunci penting. Karenanya penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen pemberitaan dalam media massa; bagaimana sebuah berita, terkhusus berita politis yang terpublikasi, terproses secara etis dalam bingkai fungsi manajemen pada umumnya. Penelitian ini dilakukan di Aji Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengamatan dan wawancara, didukung dengan referensi ilmiah, menjadi teknik dalam mendapatkan dan menganalisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pemberitaan dalam media massa pada umumnya sejalan dengan fungsi-fungsi manajemen. Persoalan ada pada media *online*. Pada media online manajemen pemberitaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena keterbatasan SDM. Studi lapangan memperlihatkan bahwa media dan jurnalis terjebak dalam persoalan etik ketika memberitakan peristiwa politik; terkhusus berita tentang calon-calon pemimpin politis. Media massa dan jurnalis terjebak dalam keputusan yang melanggar kode etik jurnalistik dengan memihak calon tertentu. Keberpihakan tersebut terlihat dalam setiap pemberitaan mengenai calon yang didukung dengan calon lainnya. Integritas diri menjadi alasan jurnalis terjebak dalam persoalan ini. Sebagai solusi, peneliti menawarkan model manajemen yang diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran etik jurnalistik. Model manajemen pemberitaan dalam mengaplikasikan fungsi manajemen, memperhatikan elemen berikut: 1) Tim penggali isu, 2) Badan Pengawas, 3) Pusat Pengaduan, 4) Badan pelaksana Pendidikan dan Pelatihan, 5) Aturan Teknis

Kata Kunci: Jurnalis, Etik jurnalistik, model manajemen etik

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) sebentar lagi akan terselenggara. Komunikasi politik sedang dilakukan para elit politik. Partai Politik sedang berproses dalam penetapan Bakal Calon (Balon) Presiden-Wapres, Kepala Daerah dan wakilnya, serta para caleg. Para elit partai sedang membangun komunikasi guna memastikan bakal calon yang diusung. Berbicara tentang pemilihan, kualitas pemilih menjadi penting. Partai politik berperan membentuk kualitas pemilih. Partai politik, merupakan salah satu elemen yang menentukan karakter warga negara dalam berpolitik dan berdemokrasi. Partai politik diharapkan mampu membangun pengetahuan politik warga negara (aspek *kognitif*), membangun karakter dan keberpihakan warga negara (aspek *afektif*), dan membangun kecakapan warga negara (aspek *psikomotorik*) (Khoiron; `1999).

Ketiga aspek terakhir ini menjadi penting mengingat dalam masyarakat terdapat kecenderungan politik yang didasarkan pada tiga orientasi yang dimasukkan dalam tiga kategori (Gabriel Almond dan Sidney Verbal dalam Azhari; 2011) yakni: kategori *cognitive*; yang memiliki pengetahuan cukup akurat untuk terlibat dalam proses politik yang berlangsung' *affective*, berkaitan dengan orang-orang yang karena alasan emosional bereaksi menerima atau menolak terhadap mekanisme politik yang berlangsung, sekalipun dengan informasi yang minim, dan kualitas yang (mungkin) masih diragukan. Kategori terakhir adalah *evaluative*, yakni orang yang berkeyakinan memiliki informasi yang sangat akurat dan pengetahuan sangat memadai tentang politik, yang mendorongnya untuk melakukan penilaian terhadap keseluruhan proses politik yang sedang berlangsung.

Selain partai politik, kecakapan warga (pemilih) dalam era digitalisasi ini juga bergantung pada informasi yang diperoleh. Informasi didapat pemilih melalui media massa. Fakta memperlihatkan bahwa sekian banyak informasi tidak benar (*hoax*) yang beredar sehingga dalam konteks pendewasaan politik tidak berjalan bagus. Penelitian ini ditujukan khusus bagi jurnalis yang bertanggungjawab menyebarkan informasi politik. Jurnalis diharapkan menyampaikan informasi yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Pilpres, Pilkada dan Pileg, agar pemilih ketika menggunakan hak politiknya memiliki dasar dan alasan

yang memadai. Sejalan dengan konsep *Public choice* pemilih hendaknya memusatkan perhatiannya pada satu pendekatan yang lebih bermakna untuk kemudian melakukan reformasi dalam memandang kekuasaan di dalam sistem politik. Interaksi politik di antara orang-orang dapat dimodelkan sebagai sebuah pertukaran yang kompleks secara kolektif. *Input*-nya, adalah evaluasi atas preferensi individu atas pertukaran apa yang hendak ditawarkan. Lebih konkritnya, pemerintah menawarkan program-program dalam pemilu, maka pemilih dapat menilai, mengevaluasi dan menentukan preferensinya dalam pertukaran kolektif seperti pemilu. Proses pemilu itu sendiri kemudian dilihat sebagai instrument yang memungkinkan penyebaran preferensi dikombinasikan ke dalam pola atau keluaran (*Output*). Keluaran dalam hal ini adalah realisasi janji-janji program dari kandidat presiden, kepala daerah maupun legislatif. (Rachbini, 2006). Media massa, melalui jurnalis diharapkan menyematani secara etis antara pemilih dengan kandidat, baik tentang latar belakang maupun program dan rancangan serta gagasan kandidat dalam membangun bangsa.

Dalam rangka penguatan kapasitas jurnalis, pendidikan dan pelatihan menjadi penting dalam proses menjadi jurnalis. Dalam proses pendidikan dan pelatihan, empat pilar pembelajaran jurnalistik perlu diperhatikan yakni laku wartawan, manajemen ruang redaksi, reportase/liputan, dan penulisan. Laku wartawan berkaitan dengan etika wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Manajemen ruang redaksi berhubungan dengan pengelolaan redaksi media. Sementara itu liputan/reportase terkait bagaimana wartawan mendapatkan berita dan tentang penulisan (Anwar : 2018: 25-28).

Sasaran empat pembelajaran jurnalistik agar karya jurnalistik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara umum ada dua efek penting yakni efek umum dan efek khusus (Yuni Mogot-Prahoru, 2021:7-8). Efek umum menyangkut efek dasar yang diperkirakan dapat terjadi sebagai akibat dari pesan-pesan yang disebarkan melalui media massa. Efek khusus menyangkut efek yang diperkirakan akan timbul pada individu-individu dalam suatu khalayak pada perilaku mereka dalam menerima pesan-pesan melalui media massa

Prinsipnya jurnalis berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (jurnalis), pers berfungsi sebagai media

informasi, pendidikan dan edukasi, hiburan atau rekreasi, kontrol sosial atau koreksi, dan juga sebagai mediasi. Tugas dan fungsi jurnalis ini berjalan baik, jika dalam menjalankan tugasnya, jurnalis sungguh-sungguh profesional; bekerja berlandaskan kode etik serta nilai-nilai moral umumnya. Selain kode etik jurnalistik, cara berpikir etis berikut dapat dijadikan landasan yakni cara berpikir deontologis, cara berpikir teleologis, dan cara berpikir kontekstual (Hage, 2021)

Cara berpikir deontologis berhubungan dengan benar atau salah, patut atau tidak, baik atau jahat. Cara berpikir teleologis berkaitan tujuan dan akibat dari setiap tindakan, Sementara cara berpikir kontekstual lebih pada tanggungjawab. Dalam praktik, ketiganya tidak bisa digunakan sendiri-sendiri. Artinya seseorang ketika mengambil tindakan, baik itu tindakan yang terencana atau tidak (situasional), ketiga cara berpikir ini harus menjadi pertimbangan dasar. Ketiga cara berpikir ini bukan menjadi pilihan, tetapi ketiganya digunakan dalam setiap situasi.

Kembali pada tugas dan peran jurnalis, secara etis dalam menjalankan tugasnya dipagari dengan kode etik jurnalis. Walaupun demikian seringkali dalam praktek jurnalis sering terjebak dalam masalah-masalah terkait pelanggaran kode etik jurnalis. Terkait pemilihan legislatif, kepala daerah ataupun presiden, pengalaman memperlihatkan bahwa ada media yang dalam pemberitaan tidak *coverboth side* Pemberitaan memperlihatkan keberpihakan pada calon tertentu. Para jurnalis menjadi tim sukses pasangan calon tertentu. Keberpihakan ini berpeluang melanggar kode etik jurnalistik pasal 1 yang mengatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Karena ketika menjadi tim sukses calon tertentu maka pemberitaan akan menjadi tidak independen, tidak berimbang dan berpeluang mempunyai itikad buruk merugikan pihak lain (calon lain).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti mencoba menemukan data lapangan praktek jurnalistik dan membangun model manajemen pemberitaan agar media dan jurnalistik terhindar dari peliputan dan pemberitaan melanggar kode etik jurnalistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tipe penelitian kualitatif. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Peneliti menjadi subyek

yang diharapkan mampu menemukan inti realitas melalui pemikiran dan refleksi kritis atas realitas yang diindrai (Moleong, 2007-8)

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari beragam sumber data. Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah informan atau narasumber., Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, dokumen-dokumen dan website yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*; teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006: 218-219).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Perekrutan Jurnalis

Studi lapangan memperlihatkan jurnalis yang bernaung di bawah AJI Kota Kupang memiliki latarbelakang pendidikan yang relatif beragam. Jurnalis yang berlatarbelakang pendidikan atau memiliki keterkaitan dengan jurnalisme, minim. Berdasarkan data lapangan, pendidikan dan pelatihan dilakukan setelah jurnalis diterima bekerja pada media tertentu. Pada umumnya pendidikan dan pelatihan hanya dilakukan pada awal perekrutan. Pendidikan dan pelatihan pun lebih seputar peliputan dan teknik penulisan. Selebihnya jurnalis belajar sendiri seiring perjalanan waktu sebagai jurnalis. Kondisi ini sulit terhindarkan, mengingat sumber daya manusia yang berlatarbelakang demikian, terbatas. Solusi yang dapat diambil manajemen setiap media adalah melakukan pendidikan dan pelatihan bagi calon jurnalis secara berkala.

Studi lapangan menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan pada awal perekrutan terfokus pada teknik penulisan berita. Padahal berbicara tentang jurnalisme tidak terbatas pada aspek tersebut. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, terdapat empat pilar pendidikan dan pelatihan jurnalistik yakni: laku wartawan, manajemen ruang redaksi, reportase/liputan, dan penulisan. Beberapa point penting dari pilar pembelajaran ini terabaikan dalam pendidikan dan pelatihan. Laku wartawan menjadi aspek penting dalam pembelajaran awal, karena laku ini memberi efek besar dalam proses di ruang redaksi, reportasi dan penulisan

berita. Penguatan laku wartawan di awal perekrutan menjadi dasar kuat dalam menjalankan tugas jurnalistik. Laku wartawan berdampak pada keputusan ketika menghadapi tawaran-tawaran di lapangan yang dapat mempengaruhi kebenaran dan keberimbangan berita.

Perimbangan berita terkait tema ini adalah memberikan informasi yang lengkap dan obyektif tentang setiap calon, sehingga pemilih kemudian menjatuhkan pilihan berdasarkan informasi valid. Pilihan yang dijatuhkan adalah pertimbangan rasional pemilih. Pemilih rasional mempertimbangkan apa yang menjadi program kandidat, bahkan lebih dari itu sepak terjang kandidat juga menjadi pertimbangan pemilih. Pemilihan berdasarkan pertimbangan demikian memberi peluang besar kandidat terpilih menjalankan pemerintahan secara etis, karena dalam konteks politik, suara (*vote*) merupakan “alat pembayaran” yang memungkinkan pertukaran antara pemilih dan kandidat terpilih yang saling menguntungkan.

Pemberitaan Politik Pilkada Provinsi NTT Tahun 2017

Penelusuran terhadap berita seputar pelaksanaan Pilkada Provinsi NTT Tahun 2017 menunjukkan bahwa ada media yang dalam pemberitaan memperlihatkan keberpihakan terhadap calon tertentu. Sebuah berita dapat diperlihatkan dengan judul:

Esthon Foenay, Bakal Calon Gubernur NTT yang Kaya Prestasi dan Pengalaman.

Kutipan lengkap berita tersebut adalah:

KUPANG- Siapa sangka calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Usungan Partai Gerindra Esthon Leylo Foenay yang saat ini tembus ternyata pernah model pakaian daerah di era 1970. Ragam prestasi di dunia fesyen ia raih di masa muda.

Esthon menyabet juara Lomba pakaian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) kala baru lulus SMA. “Dulu modis dan layak jadi peragawan pakaian daerah NTT. Saat itu usia saya 20 tahun,” Kata Esthon dalam perbincangan bersama Okezone belum lama ini.

Jebolan Magister Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana itu mengaku terjun pertama di dunia model pada umur 16 tahun, ketika bersekolah SMP Negeri 1 Kupang. Dia awalnya ikut fesyen show dan keluar sebagai juara 1 kategori pria berbusana terbaik. Sejak itu penghargaan lain di tingkat Nusa Tenggara Timur ia sabet. Hebatnya Esthon tak hanya bertabur prestasi di bidang fesyen. Karir suami Wihelmitje Foenay itu juga mentereng begitu menjadi birolrat. Macan-macam penghargaan dan tanda jasa ia raih

Esthon meraih Tanda Jasa Integrasi Timor Timur ke Wilayah NJRI (1976), Tri Fharma Adhikarya The Best Executif (1999), Development Award pada tahun 2000 serta Indonesia Executif Golden Award pada tahun yang sama.

Mantan pemegang kendali perencanaan pembangunan NTT di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu juga pernah menyabet penghargaan Citra Executive Pembangunan Indonesia (2001), Penghargaan Diklat Kepemimpinan

Nasional Tingkat I (2001), Satyalencana Karya Satya 30 Tahun (2005) serta Lencana Tunas Melati (2011).

Esthon merupakan alumni Manajemen Penanggulangan Bencana Alam di Australia, Ketua Harian KONI NTT periode 2009-2013), dan wakil Gubernur NTT periode 2008-2013. Beragam pengalaman itu yang menjadi modal Esthon maju sebagai calon gubernur di Pilgub NTT 2018

Berita di atas memperlihatkan keberpihakan jurnalis sekaligus media terhadap pasangan tertentu, padahal keberpihakan tersebut melanggar kode etik jurnalis. Keberpihakan tersebut ditunjukkan dengan mempromosikan kelebihan satu calon tanpa membandingkan calon lain sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan sehingga menggiring animo pemilih terhadap calon tersebut.

Selain itu, media tersebut juga mempublikasikan berita tentang proses pemilihan gubernur yang cenderung menonjolkan tentang pasangan tersebut. *Angel* beritanya sebagai berikut: “*Mantap! Relawan Partai Prindo Kompak Usung Cagub Esthon-Chris Menangi Pilgub NTT*”, “*Tepis Isu Khilafah di Pilgub NTT, Esthon-Chris : Itu Sudah Basi*” dan *Pilkada NTT, Esthon: Kalah atau Menang Itu Restu dari Tuhan*”

Pemberitaan tentang pilkada provinsi sebagaimana dikutip sebelumnya memperlihatkan media dan jurnalis terjebak ke dalam persoalan etis. Persoalan etis dalam aspek ini adalah keputusan etis yang mesti dilakukan media dan jurnalis. Keputusan etis berhubungan dengan cara berpikir etis. Ada tiga cara berpikir etis yakni deontologis, teleologis, dan kontekstual. Dalam praktik, ketiganya tidak bisa digunakan sendiri-sendiri. Artinya jurnalis saat mengambil tindakan, baik itu tindakan yang terencana atau tidak (situasional), ketiga cara berpikir ini harus menjadi pertimbangan dasar. Ketiga cara berpikir ini bukan menjadi pilihan, tetapi ketiganya digunakan dalam setiap situasi sehingga mengambil keputusan etis yang berisiko negatif paling kecil (*minus malum*).

Saat menjalankan tugas jurnalistik, dan menghadapi situasi dilematis moral, jurnalis dituntut mengambil keputusan etis. Pengambilan keputusan etis tersebut sepenuhnya bergantung pada jurnalis itu sendiri karena lebih mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya. Jurnalis sedapat mungkin membuat pertimbangan sebanyak mungkin, terlebih pertimbangan yang berkaitan dengan aturan hukum dan kode etik jurnalistik, sebelum mengambil keputusan. Setiap keputusan mempunyai dampak. Apapun dampak tersebut, pengambil keputusanlah yang bertanggung jawab. Jurnalis yang telah mengambil keputusan

ketika menghadapi situasi tertentu siap menerima dan mempertanggung jawabkan atas risiko yang akan terjadi.

Penjelasan menyangkut pemberitaan seputar pemilihan gubernur tahun 2017 dan kaitannya dengan cara berpikir etis jurnalis sebagai berikut:

1. Deontologis

Secara normatif berita tersebut tidak memperlihatkan keberimbangan, karena hanya menonjolkan keberhasilan yang diraih calon tertentu saja. Berita tersebut memberi kesan kuat keberpihakan jurnalis dan media terhadap pasangan tertentu. Sikap ini melanggar prinsip jurnalisme tentang independensi dan penyediaan forum publik dan prinsip lain seperti mengikuti suara hati. Keberpihakan terhadap calon tertentu juga melanggar kode etik jurnalistik tentang keberimbangan yang termuat dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Keberimbangan dalam konteks ini diartikan sebagai pemberian ruang dan waktu kepada setiap calon untuk dipublikasikan.

2. Teleologis

Memberitakan kelebihan satu calon saja dalam proses pemilihan gubernur bertujuan untuk mendapatkan simpati masyarakat terhadap calon tersebut dan pada akhirnya memilih calon tersebut saat pemilihan. Upaya mencapai tujuan demikian, membuat jurnalis mengabaikan prinsip jurnalisme dan kode etik jurnalistik.

3. Kontekstual

Cara berpikir ini disebut juga etika tanggungjawab. Etika tanggungjawab menuntut seseorang mengambil keputusan sendiri secara bertanggung jawab dalam kondisi yang sedang dihadapi. Kelemahan cara berpikir demikian adalah seseorang dapat mudah terjebak situasi dan tanpa prinsip. Ketika berpatokan pada prinsip ini, seseorang tidak memiliki pegangan etis dalam bertindak. Hal ini ditunjukkan jurnalis dan media yang mempublikasikan berita tentang kelebihan kandidat Esthon Foenay dalam pemilihan gubernur tahun 2017. Keputusan media massa untuk bargaining pada pasangan tertentu adalah keputusan yang diambil saat mendapatkan tawaran dari pasangan calon gubernur. Ketika menerima tawaran tersebut tentu ada kesepakatan yang dibangun untuk ditaati

bersama. Media massa memiliki kewajiban untuk menonjolkan pasangan tersebut dalam pemberitaan. Tawaran yang diterima media massa akan berimbas pada jurnalis di lapangan, yang memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak. Kasus ini, jurnalis mengikuti manajemen pemberitaan untuk fokus memberitakan calon tertentu. Situasi ini memperlihatkan bahwa media massa dan jurnalis terjebak dalam cara berpikir etis yang tidak didasarkan pegangan etis sebagaimana yang dirumuskan dalam kode etik jurnalistik tentang independensi, keberimbangan, penyediaan forum publik/penyediaan informasi berimbang.

Manajemen Pemberitaan

Secara umum setiap berita sebelum dipublikasikan melewati proses sebagai berikut:
(media cetak)

1. Rapat dewan redaksi (rapat proyeksi)

Malam sebelum peliputan, dewan redaksi berdiskusi tentang isu dan informasi terkini ataupun isu yang dalam pandangan dewan redaksi penting berdasarkan berbagai kriteria.

2. Penugasan jurnalis

Isu dan informasi tersebut kemudian didiskusikan dengan jurnalis lapangan untuk mennggali data dengan memperhatikan prinsip dan syarat jurnalistik agar isu dan informasi tersebut layak dipublikasikan serta terbebas dari berbagai dampak yang dapat timbul akibat pemberitaan yang keliru

3. Rapat dewan redaksi

Setelah jurnalis lapangan mendapat data, dewan redaksi kembali berdiskusi; melihat kelayakan data yang ada. Dewan redaksi mempertimbangkan kelayakan informasi untuk diserahkan kepada tim editor.

4. Penyuntingan dan Publikasi

Tim editor melakukan penyuntingan dan seterusnya diserahkan kepada tim *lay out* dan percetakan untuk dipubish.

Berita-berita yang tidak direncanakan oleh dewan redaksi adalah berita-berita kreativitas atau diperoleh tanpa sengaja oleh jurnalis lapangan. Berita-berita demikian biasanya melewati tahapan 3 dan 4. Sementara itu proses media *online* cenderung mengabaikan tahapan ini. Pengabaian ini karena manajemen media *online* lebih

mengedepankan kecepatan berita. Data memperlihatkan bahwa jurnalis media *online* sendiri merencanakan, mengedit dan mempublikasikannya. Selain itu, kemunculan media *online* tanpa melalui prosedur yang ketat.

Secara konseptual, dari beberapa ahli seperti H. Fayol, George Tery, James Stoner, fungsi manajemen dapat dikategorikan sebagai *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Organisasi), *Actuating* (Pergerakan) dan *Controlling* (Pengawasan) (Ruyatnasih dan Megawati, 2018). Empat fungsi manajemen ini menjadi acuan dalam manajemen pemberitaan.

1. *Planning* (Perencanaan)

Rapat Proyeksi

Perencanaan berita merupakan tugas peimpin redaksi, para redaktur serta kordinator liputan. Wartawan di lapangan juga bisa merencanakan sendiri pemberitaan, tetapi berkomunikasi dengan redaktur dan korrinator liputan.

Pada tahap perencanaan dalam manajemen pemberitaan biasanya diawali dengan perencanaan rapat proyeksi redaksi. Istilah lain dari rapat proyeksi adalah rapat perencanaan berita, rapat peliputan, atau rapat rutin wartawan di bawah koordinasi kordinator liputan (korlip). Rapat biasanya diselenggarakan sore atau malam hari, dihadiri seorang atau beberapa redaktur, bisa redaktur bidang, redaktur halaman, redaktur senior, atau bahkan redaktur pelaksana.

Perencanaan juga diawali dengan rapat proyeksi penugasan terhadap wartawan tertentu. Pada umumnya, rapat ini dihadiri oleh pimpinan redaksi (pimpinan redaksi ini bisa meliputi pimpinan redaksi itu sendiri, wakil pimpinan redaksi, dan redaktur pelaksana), redaktur, tim litbang (perwakilan litbang), perwakilan layout (petugas layout) serta sekretaris redaksi. Rapat proyeksi dipimpin oleh pimpinan redaksi, apabila berhalangan hadir bisa diwakili oleh wakil pimpinan redaksi. Rapat proyeksi membahas tentang evaluasi berita yang hari ini terbit serta penentuan berita apa yang akan diangkat keesokan harinya (penentuan tema dan penentuan halaman).

Dalam rapat proyeksi selain menyampaikan isu yang akan digarap, juga menegaskan hal teknis seperti informan yang perlu ditemui, serta hal-hal lain terkait prosedur etik dalam mendapatkan berita.

2. *Organizing* (Organisasi)

Secara organisatoris media pada umumnya (manajemen pemberitaan) terdiri dari pemimpin redaksi. Seterusnya ada wakil pimpinan redaksi, Redaktur pelaksana, redaktur-redaktur, koordinator liputan, wartawan lapangan dan staf lainnya (termasuk *lay out* dan percetakan). Selain itu ada badan khusus yang dinamakan Litbang.

3. *Actuating* (Pergerakan)

Peliputan dan *Publishing*

Pada tahap ini pelaksanaannya ada pada jurnalis lapangan dan editor yang didasarkan pada rancangan yang sudah dibahas sebelumnya. Rancangan pemberitaan tersebut sedapat mungkin agar terhindar dari persoalan-persoalan etik ataupun hukum.

Prosedurnya adalah jurnalis lapangan akan mencari dan meliput berita yang sudah diproyeksi dan seterusnya menulis kembali atau mengirimkannya ke redaksi. Berita tersebut akan didiskusikan kelayakannya dalam rapat redaksi malam hari dan kemudian dikembalikan kepada redaktur sesuai bidangnya untuk diedit. Setelah diedit berita tersebut siap dipublish melewati tahap *lay out* sebelum dicetak.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Umumnya media tidak mempunyai badan khusus yang mengawasi keseluruhan proses pemberitaan. Tetapi tugas pengawasan secara tidak langsung ada badan khusus yang dinamakan Litbang. Walau demikian badan ini tidak berkomunikasi langsung dengan jurnalis di lapangan. Segala informasi dan isu serta gagasan terkait pemberitaan dikomunikasikan melalui pemeimpin redaksi dan kemudian informasi tersebut diteruskan melalui jalur yang sudah sampai ke jurnalis lapangan ataupun koresponden. Secara realnya, pengawasan dalam manajemen pemberitaan dilakukan dalam keseluruhan proses publikasi berita. Aspek pengawasan mulai dari rencana pemberitaan, penugasan dan pengeditan berita (akurasi penulisan dan bahasa). Setelah berita terpublikasi, masih dilakukan evaluasi di tingkat redaktur (pemimpin redaksi, wakil redaksi, redaktur-

redaktur, koordinator liputan. Pengawasan menjadi sangat penting karena berita yang terpublikasikan memiliki konsekuensi etis bahkan konsekuensi hukum.

Studi lapangan memperlihatkan bahwa implementasi manajemen pemberitaan pada media cetak maupun media elektronik tergolong sesuai, tetapi menjadi masalah pada media *online*. Permasalahannya disebabkan oleh penekanan pada kecepatan berita. Lebih parah lagi, data memperlihatkan bahwa hirarkir organisasi tidak ada karena SDM yang tidak banyak dalam media online. Semua jurnalis yang bergabung dalam media online langsung ke lapangan mencari berita dan langsung mengedit dan mempublikasikannya.

Hal positif yang ada pada media *online* adalah konfirmasi dari pembaca dapat diperoleh cepat di kolom komentar, jika terdapat “masalah” pada berita yang sudah terpublish. Inilah perbedaan media online dengan media massa cetak sebagaimana dikatakan Deuze bahwa komponen teknologis adalah faktor penentu dalam definisinya. Ia menyatakan bahwa perbedaan online journalist dari rekan-rekan tradisionalnya terletak pada keputusan jenis baru yang dihadapi oleh para wartawan cyber. “Online journalist harus membuat keputusan-keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah tertentu, dan harus memungkinkan ruang bagi pilihan-pilihan publik untuk menanggapi, berinteraksi, atau bahkan menyusun (*customize*) cerita-cerita tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain, melalui *hyperlinks*”. (Santana, 2005: 137). Sebuah studi oleh Singer (dalam Santana, 2005: 138) mengidentifikasi bahwa ketika surat kabar menjadi online, peran penjaga gerbang (*gatekeeper*) mereka menghilang. Ini berarti seorang wartawan bisa mengakses berita yang mereka dapat ke internet tanpa melalui redaktur. Hal demikian memperlihatkan pengabaian dalam pengontrolan terhadap berita, sehingga memberi ruang besar terjadi ketidakakurasian, kekeliruan atau kesalahan sebuah berita.

Secara kritis dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi manajemen dalam manajemen pemberitaan tergolong sesuai namun secara organisasi, tidak adanya struktur yang secara jelas menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Hasil penelitian ini menganjurkan struktur organisasi yang dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Mekanisme kerja dalam struktur tersebut memperlihatkan sebuah model manajemen yang

ditawarkan sebagai hasil penelitian ini. Struktur tersebut diperlihatkan pada saran yang diberikan dalam bagian kesimpulan dan saran.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dibuat adalah:

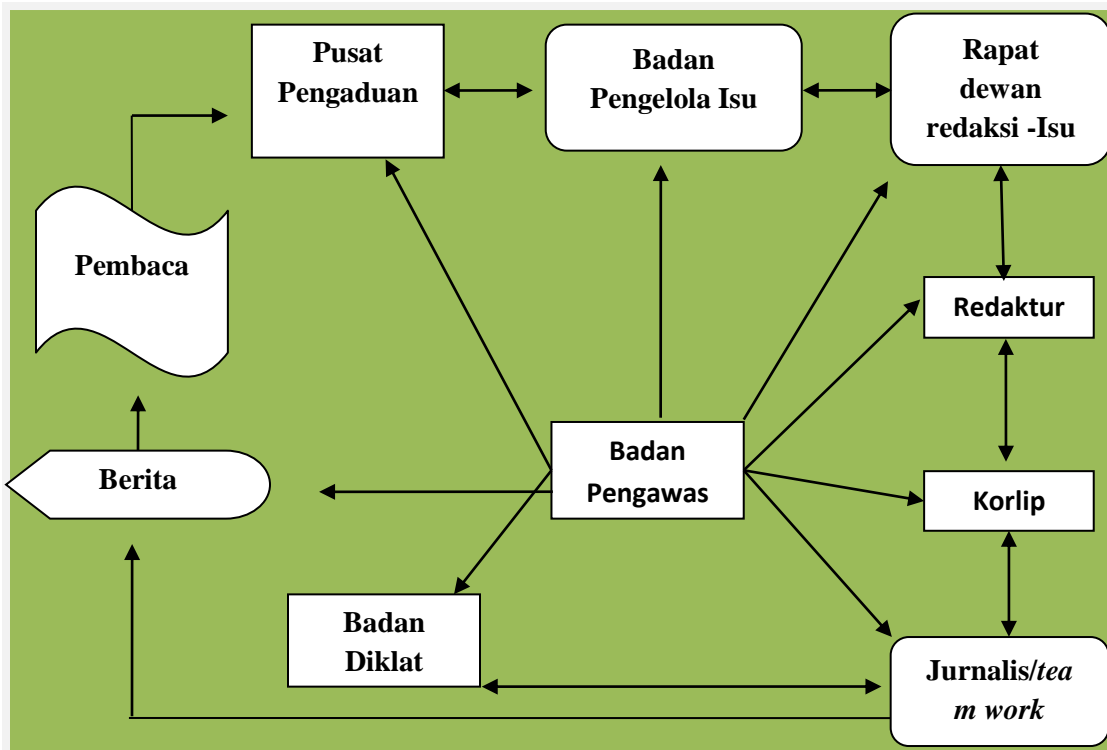
1. Maksimalisasi pelaksanaan manajemen pemberitaan terkendala dengan:
 - a. Sumber daya manusia yang terbatas
Keterbatasan Sumber daya manusia ini bermula dari latarbelakang pendidikan jurnalis yang tidak berhubungan dengan jurnalisme
 - b. Prosedur perekrutan yang tidak ketat
 - c. Jurnalis terjebak dalam persoalan etis
 - d. Prosedur pembentukan media yang gampang, secara khusus media *online*, di mana setiap orang boleh mendirikan media massa dengan persyaratan yang mudah
2. Diperlukan model manajemen pemberitaan yang mampu meminimalisir pelanggaran kode etik jurnalistik. Manajemen media perlu kreatif mengambil langkah pencegahan seperti menyusun aturan teknis yang lebih detail, atau membentuk tim pengawas intern.

Saran

1. Kendala dalam manajemen pemberitaan
 - a. Manajemen media merancang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jurnalistik secara berkala. Pendidikan dan pelatihan tidak dilakukan hanya pada saat awal menjadi jurnalis.
 - b. Mekanisme perekrutan wartawan diperbaiki. Perlu ada standarisasi yang jelas sehingga menghasilkan wartawan yang professional.
 - c. Pengetatan dalam prosedur pembentukan media massa terlebih media *online*
1. Membangun model manajemen Pemberitaan
Peneliti menyarankan model manajemen dengan memperhatikan elemen berikut dalam menjalankan fungsi manajemen pada umumnya :
 - a. Badan Pengelola Isu. Tim khusus di luar redaksi (organisasi pemberitaan) untuk menggali dan merancang isu.

- b. Dewan redaksi (mempertimbangkan kebutuhan lapangan untuk memperoleh data/informasi, baik informasi umum maupun informasi dari tim khusus. Dewan redaksi dapat membentuk tim pencari informasi untuk berita-berita yang membutuhkan sumber beragam sehingga mempercepat upaya mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat)
- c. Badan pengawas (melakukan pengawasan terhadap seluruh komponen yang terlibat dalam manajemen pemberitaan).
- d. Aturan Teknis (Setiap media menyusun aturan teknis sebagai pegangan bersama dalam melakukan peliputan dan publikasi berita. Aturan teknis ini didasarkan pada kode etik jurnalistik)
- e. Pusat Pengaduan (menerima pengaduan dari pembaca maupun seluruh masyarakat)
- f. Badan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan (merancang pendidikan dan pelatihan jurnalistik secara berkala)

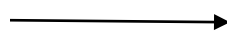
Model Manajemen Pemberitaan



Keterangan:



: Komunikasi/koordinasi timbal balik



: Pengawasan dan proses menghasilkan berita dan

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, 2018; *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*, Prenadamedia Group: Jakarta.

Azhari, 2011, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta

Khoiron, M. Nur, 1999, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara* (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja)

Hage, Markus Yohanes 2021, *Etika Profesi Hukum*. (Bahan Ajar), Undana, Kupang.

Lexy J. Moleong . 2007; *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung

Rachbini, J. Didik, 2006: *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*, Ghalia Indonesia: Bogor

Ruyatnasih, Yaya dan Megawati, Liya, 2018; *Pengantar Manajemen, Teori, Fungsi dan Kasus*, CV Absolute Media, Yogyakarta

Santana, Septiawan. (2005); *Jurnalisme Kontemporer.*: Yayasan obor Indonesia, Jakarta.

Sugiyono. (2006); *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*: Alfabeta, Bandung

Yuni Mogot-Prahor, 2021; *Manajemen Surat Kabar: Panduan Ilmu, Pengetahuan, Seni, Nurani dan Intuisi*; Prenada Media Group, Jakarta

Dewan Pers; *Kode Etik Jurnalistik*

UU No. 40 Tahun 1999 Pers